Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah dipahami , maka perlu tinjuan menurut para ahli maupun teori- teori yang berkenan dengan penelitian yang diteliti.Pembahasan kajian teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian .

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. [4]

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.[5]

SP. Siagian,menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented”telah

[4]. Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

[5]. Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber- sumber dan staf dans elanjutnya menyusun peraturan - peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
b. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
c. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.[6]

2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

PNPM (Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Perkotaan mulai diterapkan pada tahun 2009. Dimana Program ini memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan melalui Pendampingan dan Pemberdayaan dalam kegiatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah Tri daya (Lingkungan, Ekonomi dan Sosial). Seiring dengan berjalannya waktu PNPM bertransformasi menjadi P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) tidak bertahan lama P2KP berubah nama menjadi P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Permukiman) namun seirng dengan banyaknya berubah akhirnya sekarang berubah dengan nama KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah di resmikan pada April 2016 kemarin hingga sekarang dalam proses berjalan. Dalam Program KOTAKU ini tujuan nya adalah memaksimalkan ketersediaan akses air bersih, meminimalkan daerah kumuh dan memaksimalkan ketersediaan MCK atau Sanitasi yang layak. Dan ketiga tujuan itu lebih dikenal dengan istilah 100-0-100.

[6] .P.Sondang Siagian,Filsafat administrasi ,Jakarta : Gunung Agung 1985 , Hlm .120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.Munculnya KSM yang dibentuk KOTAKU akan muncul diantara kelompok-kelompok yang sudah eksis.Hal itu menambah dinamika dimasyarakat karena antar kelompok akan saling berinteraksi dan saling belajar.prinsip-prinsip dalam ksm agar benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota maka ada beberapa prinsip yang perlu disepakati,yang bisa dijadikan pedoman di dalam kelompok swadaya masyarakat yaitu saling mempercayai dan saling mendukung,bebas dalam membuat keputusan dan bebas dalam menetapakan kebutuhan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses penyadaran masyarakat agar masyarakat tesebut biasa mengatasi masalahnya sendiri. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu yaitu :

a) Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, laki-laki dan perempuan, untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun.
b) Solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.
c) Masyarakat memahami tujuan, nilai dan prinsip dasar, peran dan fungsi, kriteria anggota, serta aturan main dan kegiatan KSM.
d) Membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan.
e) Kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial.
f) Berfungsinya aturan main, tanggung renteng dan keswadayaan.
g) Berfungsinya aturan main, tanggung renteng dan keswadayaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kegiatan KOTAKU yang lebih dikenal dengan istilah Tri Daya yaitu Kegiatan Ekonomi, Dimana tiga program Ekonomi Bergulir yaitu :

a) Pinjaman Ekonomi BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Reguler bersumber dari dana APBN dengan modal awal Rp. 70.000.000.
   Dengan jasa 1,5 % dalam jangka waktu maksimal 1 tahun .
b) Pinjaman Ekonomi Pentaskin (Pengentasan Kemiskinan) bersumber dari APBD dengan modal awal RP. 50.000.000.
   Dengan jasa 1,5 % dalam jangka waktu maksimal 1 tahun
c) Pinjaman Ekonomi PPMK (Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas) bersumber dari dana APBN dengan modal awal Rp. 95.000.000.

Masing masing tiga sumber modal dan pinjaman diatas memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang satu yaitu mengentaskan kemiskinan agar peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas atau kelompok.

Adapun syarat untuk melakukan peminjam dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),Pentaskin ,PPMK adalah :

a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan syarat :
   1) Kartu Keluarga
   2) Fotocopy KTP
   3) Foto Usaha
   4) Foto Peminjam 4 X 6
   5) Berkelompok minimal 5 orang
b. Pentaskin (Pengentas Kemiskinan)
   1. Kartu Keluarga
   2. Fotocopy KTP
   3. Foto Usaha
   4. Foto Peminjam 4 X 6
   5. Berkelompok minimal 5 orang
c. PPMK (Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas)
   1. Kartu Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Fotocopy KTP
3. Foto Usaha
4. Foto Peminjam 4 X 6
5. Berkelompok minimal 5 orang
6. Usaha harus produktif [7]

a. Prinsip Pembentukan KSM

KSM sebagai pelaku langsung kotaku, pembentukannya mesti berpijak pada pertimbangan kepentingan jangka panjang dalam rangka keberdayaan anggota, bukan terbentuk semata-mata berorientasi dana kotaku. Pembentukan KSM diutamakan sebagai wadah pembelajaran. Hal ini ditegaskan untuk menghindari minat masyarakat semata-mata ke arah dana BLM.Inisiatif pembentukan KSM haruslah dari masyarakat sendiri dan berdasarkan pada kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.

Ketententuan Pembentukan Ksm Secara teknis operasional, warga masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi KSM dan FGD Dinamika Kelompok dapat membentuk KSM, dengan koridor yaitu : KSM yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu di antara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (RT/RW), dibentuk atas prakarsa warga secara sukarela, sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip KOTAKU, utamanya dalam hal membangun kebersamaan, kerjasama, berdemokrasi, serta berakuntabilitas, sehingga secara definitif memenuhi kaidah umum .Prakarsa pembentukan pada dasarnya oleh warga miskin, namun apabila dibutuhkan dapat saja melibatkan warga yang secara ekonomi tergolong mampu sepanjang dibutuhkan keterlibatannya oleh warga miskin (dengan jumlah tidak lebih dari 1/3-nya), dimana keterlibatan warga dimaksud lebih diperankan sebagai relawan dalam penguatan KSM bersangkutan dan tetap dapat dijamin bahwa warga miskin sebagai penerima manfaatnya Dalam hal terdapat KSM dibentuk dari

[7] Buku petunjuk teknik kelompok swadaya masyarakat (KSM).2015

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

basis Kelompok-kelompok Masyarakat (POKMAS) yang telah ada, maka prakarsa pembentukannya tetap oleh warga miskin sebagaimana kaidah di atas, namun proses belajar bersama dalam membangun kesadaran kelompok yang lebih dinamis akan dilakukan melalui forum-forum belajar dalam POKMAS dimaksud ataupun melalui forum-forum KBK (Komunitas Belajar Kelurahan). Dalam hal dimana orientasi KSM lebih diutamakan dalam kerangka akses kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial atau kegiatan yang bermakna bagi kepentingan umum (tidak bernilai kegiatan yang bersifat ekonomi produktif).

b. Persyaratan Pendirian Kelompok Swadaya Masyarakat

Adapun syarat pendirian Kelompok Swadaya Masyarakat adalah :

a) Adanya ikatan pemersatu yang jelas, seperti Kesamaan tempat tinggal, Kesamaan tempat/lokasi pekerjaan, Kesamaan status dan Kesamaan hobi
b) Adanya kesamaan akan kebutuhan aspek ekonomi tertentu seperti Kebutuhan akan modal usaha, Kebutuhan akan bahan baku / persediaan barang dagangan tertentu dan Kebutuhan akan sarana tempat usaha
c) Adanya pemrakarsa atau sekelompok kecil orang inti yang memiliki peranan berpengaruh dan dipercaya orang lain di sekelilingnya.
d) Adanya lembaga ataupun perorangan yang memberikan bimbingan dalam pengembangan program kegiatan kepada kelompok.
e) Adanya orang yang dengan sukarela bersedia mengelola dan melakukan kegiatan pelayanan kepada para anggota kelompok.
f) Adanya tujuan bersama yang disepakati dan memberikan manfaat.

c. Peran dan Fungsi KSM

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari kegiatan berkelompok. Oleh karena itu,keberadaan KSM diharapkan bisa memenuhi kebutuhan materiil maupun psikologiswarga masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan hal tersebut, maka KSM diharapkan dapat berperandan berfungsi seperti berikut ini :

1. Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.
2. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah**.** Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM lazimnya berkaitan dengan upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya merupakan rumusan bersama yang disepakati secara bersama-sama pula.
3. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi**.** Jika ada permasalahan,kepentingan, ataupun harapan yang berkembang di masyarakat, maka KSM dapatmenampungnya, membahas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang relevan,dengan tetap berpijak pada hak-hak warga masyarakat yang lainnya.
4. Sebagai wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang *socialtrust*). Melalui KSM, para anggota bisa saling terlibat dalampelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab semata-mata atas dasar salingpercaya. Saling percaya secara sosial ini dapat dibangun melalui cara penjaminan diantara para anggota kelompok yang telah bersepakat, serta melalui rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lainpun,kepercayaan tersebut sebagai modalnya yang utama.
5. Sebagai wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat**.** Jika masyarakat membutuhkan dana atau modal, maka KSM bisa berfungsi sebagai salah satu sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar ataupun dari internal anggota sendiri, misalnya dengan cara iuran bersama. Iuran anggota tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun kekuatan secara mandiri.[8]

Seperti diketahui di KSM terdapat tahapan pembelajaran pembangunan masyarakat.Tahapan tersebut terdiri dari masyarat tidak berdaya , mandiri dan menuju madani.Masyarakat pada tahap awal adalah adalah masyarakatyang belum didampingi. Masyarakat berstatus Masyarakat Berdaya mempunyai empat aspek pembelajaran, yaitu belajar mengubah cara pandang, membangun lembaga yang dipercaya untuk penanggulangan kemiskinan, menyusun program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan kegiatan Tridaya. Pada tahapan Masyarakat Mandiri, Ksm dan masyarakat mampu bermitra dengan Pemda atau dunia usaha serta mampu mengakses berbagai sumber daya di sekitarnya. Untuk tahapan Masyarakat Menuju Madani masyarakat dan seluruh pihak mampu melaksanakaan pembangunan yang berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik.[9]

3. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama) ,yaitu suatu keadaan terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup,khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian,perumahan,pendidikan,dan perawatan kesehatan.[10]

Menurut Friendlander kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangankan

[8] . Petunjuk teknis Pengembagan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).2016

[9] Kementerian Pekerjaan Umum Direktoral Jendral Cipta Karya.2014

[10]. Edi Suharto,Ph.D.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* .Bandung : PT Refika Aditama.2005.hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu -individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[11] Untuk memperoleh tingkat kesejahteraan kesejahteran sosial dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan untuk secara efektif menggali dan menggerakkan sumber-sumber daya manusia serta sumber-sumber material yang ada disuatu negara agar dapat berhasil menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sosial yang ditimbulkan oleh perubahan, dengan demikian berperan serta dalam pembinaan masyarakat

Peringkat kesejahteraan masyarakat disuatu tempat tetentu,yang bertujuan untuk memperoleh gambaran profil kondisi sosio-ekonomis dengan menggali persepsi perbedaan-perbedaan kesejahteraan antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya dan ketidakseimbangan di masyarakat, menemukan indikator-indikator lokalmengenai kesejahteraan.[12]

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan wujud dari upaya terpenuhi segala aspek kehidupan oleh individu atau kolektif profesional sehingga tercapai hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi secara sosial,dimana warga negara diberi perlindungan, pemberdayaan ,dan jaminan sosial

[11] .Prof.Dr.Hj.Ummu Salamah,MS.*Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* .Bandung : Insan Akademika.2012.hlm,15

[12] .Aziz Muslim.*Metodologi Pengembangan Masyarakat* .Yogyakarta.2009.Hlm,127

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah . Kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara melembaga dan berkelanjutan dalam wujud managmen berkualitas (adil, terpadu, terbuka, bermanfaat, bermitra, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan berkelanjutan).[13]

Khususnya untuk kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan startegi sebagai terobosan pemerintah melalui programnya, untuk mendukung program pembangunan tersebut ,baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.[14]

Selanjutnya kesejahteraan diartikan sebagai kesamaan dan keselamatan, kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya. Adapun kesejahteraan yang diartikan kemakmuran ,Yang dimaksud kemakmuran adalah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia dipenuhi dengan wajar, secara mantap/ terus-menerus, secara kongkrit itu berarti tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup tidak hanya untuk memungkinkan hidup tetapi juga untuk mempermudah sehingga orang-orang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Setiap orag mememilki keinginan untuk sejahtera ,sesuatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi dimana orang –orangnya dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat dan dami.lebih lengkapnya kementrian coordinator kesejahteran rakyat memberikan pengertian sejahteran adalah suatu kondisi masyarakat yang telah

[13] .UU No.11 tahun 2009 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial* pasal 2 ayat 1

[14].Ir.Wisnu Indrajit VO , Soimin, SH.,M.Hum.*Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* .Malang : 2014.hlm, 58

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terpenuhi kebutuhan dasarnya .kebutuhan dasarnya tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan ,dan kebutuhan lainnya seperti lingkungan bersih,aman,dan nyaman ..Untuk mencapai kesejahteraan itu manusia melakukan berbagai macam usaha misalnya bidang pertanian ,perdagangan ,pendidikan ,kesehatan,serta keagamaan ,dan pertahanan keamanan.

Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah/fisik dan batiniyah Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi ini pun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Dengan parameter kesejahteraan seperti itu, kita bisa mengukur diri kita, saudara kita dan masyarakat disekitar kita. Walaupun tidak mutlak benar. Ukuran ukuran ini bisa membantu mengukur tingkat keberhasilan kerja pemerintah perusahaan dan sebagainya. Indikator Kesejahteraan Ekonomi yaitu Pada mulanya pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebab dapat menggambarkan laju perkembangan tingkat kesejahteraan berbagai Negara. Namun dalam perkembangannya, pendapatan per kapita yang digunakan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai banyak kelemahan-kelemahan.

Pendapatan per kapita yang dianggap sebagai pengukur tingkat kesejahteraan tidak menggambarkan komposisi umur, distribusi pendapatan masyarakat, komposisi pendapatan nasional, corak pengeluaran, perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran. [15]

[15] .Adi Isbandi Rukminto.Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial :Depok.2005.Hal 89

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, edamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.[16]

B. Hipotesis

Hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian.[17]

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hα : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan kelompok swadaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi kelurahan lembah sari kecamatan rumbai pesisir`

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan kelompok swadaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi kelurahan lembah sari kecamatan rumbai pesisir.

Kaidah pengujian :

Jika r hitung ≥ r tabel ,maka Ho ditolak artinya signifikan dan

R hitung ≤ r tabel ,maka Ho diterima artinya tidak signifikan

Dengan taraf signifikan :α = 5 % atau 0,05

C. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Sylvia Rara Prastika (2013) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dalam Skripsinya **‘’ Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

[16] Ahmad Mahyudi .Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiri : Bogor.2004.Hal 151

[17] Drs.Nurul Zuriah,M.Si. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : PT Bumi Aksara .2006. Hal 162.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Ekonomi Islam " dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pengurus PNPM Mandiri kecamatan payung sekaki serta data dokumentasi dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai berikut : *pertama,* tidak ada perbedaan pada tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM sebelum mengikuti pembinaan dengan sesudah mengikuti pembina. *Kedua,* program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki.

2. Sofia Hardani (2011) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum , dalam Skripsi **" Dampak Program Up2k (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Penerimaan Bantuan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan** " Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *pertama,* program UP2K juga memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan meskipun tidak begitu signifikan. *Kedua,* pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras sejauh ini telah tepat sasaran, akan tetapi masih ada terdapat penyalah gunaan pada beberapa orang pengurus. *Ketiga,* mengenai pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan kuras dan dampak yang diberikan dari pelaksanaan program UP2K ini dibolehkan oleh syari'at Islam, karena sesuai dengan nilai utama Islam mengenai keadilan dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya sesuai dengan syri'at Islam.

3. Mariana (2011) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dalam Skripsinya " **Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru**" Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana dapat berkontribusi dengan baik terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang ingin dilihat hubungannya yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan variabel independen atau variabel bebas (x) dan Kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan variabel dependen terikat (y) pada penelitian ini ingin melihat pengaruh pelaksanaa kelompok swadaya masyarakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat .

1. Pengaruh pelaksanaan Program Kelompok Swadaya Masyarakat
   a) Pemahaman anggota KSM tentang ekonomi bergulir.
   b) Proses pelaksanaan ekonomi bergulir.
   c) Pemanfaatan pelaksanaan ekonomi bergulir.
2. Kesejahteraan Ekonomi
   a) Kondisi terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
   b) Terpenuhinya modal usaha anggota

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU